

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas dan juga merupakan salah satu kebijakan di Indonesia untuk mencapai tujuan yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara adil, makmur dan merata. Kebijakan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata di setiap daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga akan memacu tumbuh kembangnya kemampuan ekonomi untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, masyarakat dan pemerintah daerah harus bekerja sama dalam mengelola potensi wilayahnya, sehingga tujuan untuk menciptakan jenis lapangan kerja yang baru dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah dapat tercapai. Masyarakat dan pemerintah daerah juga harus mampu mengidentifikasi potensi dari setiap sumber daya yang dibutuhkan untuk dijadikan rancangan pembangunan perekonomian kedepannya. Kemandirian daerah akan tercipta jika pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah berjalan dengan baik dan didukung oleh program pemerintah yang jelas.

Perwujudan dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya Otonomi Daerah. Otonomi daerah juga dapat memaksimalkan tujuan dari pembangunan daerah dengan memberikan

kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Adanya otonomi daerah, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat lebih memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dikarenakan pemerintah daerah dapat lebih memahami masyarakatnya terkait apa yang mereka butuhkan.

Kebijakan otonomi daerah ini sudah berjalan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2001. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004, otonomi daerah adalah wewenang masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus setiap kegiatan yang ada di wilayah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan utama dalam menciptakan kesejahteraan dengan meningkatkan perekonomian. Otonomi daerah sendiri menganut asas desentralisasi yang merupakan pemberian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk penciptaan kemandirian dan kreativitas daerah.

Demi terselenggaranya otonomi daerah secara optimal, maka telah ditetapkan dalam UU No.33 Tahun 2004 yang berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini dijadikan sebagai wujud dukungan pendanaan atas dilakukannya asas desentralisasi oleh pemerintah daerah. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 pasal 5, sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, maka suatu daerah harus mengoptimalkan besar Pendapatan Asli Daerahnya.

Undang-Undang No.33 tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima daerah dimana bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Bagi daerah otonom, Pendapatan Asli Daerah dijadikan sebagai sumber keuangan terbesar, dimana PAD digunakan sebagai indikator untuk melihat kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi proporsi PAD terhadap penerimaan daerah maka semakin kecil pula ketergantungan daerah pada pemerintah pusat.

Banyak sedikitnya PAD yang diterima merupakan cerminan bagi keuangan daerah dan hasil dari bentuk pengalokasian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai setiap kegiatan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam kenyataannya semua kabupaten dan kota di Provinsi NTT, penerimaan PAD-nya belum mampu membiayai semua pengeluaran pemerintah daerah, karena kontribusinya relatif sedikit dan masih banyak menggantungkan pada dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga peluang adanya pertumbuhan ekonomi harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi mendorong berkembangnya perekonomian.

Dengan hal ini, pemerintah daerah bukan berarti harus menambah pungutan pajak baru, melainkan pemerintah daerah harus pandai dalam menggali potensi daerah yang dimiliki secara optimal yang dapat dijadikan sebagai penerimaan daerah. Keselarasan antara pemerintah daerah dan

masyarakat harus tetap terjaga dalam menetapkan kebijakan yang tepat dan dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang ada. Pemerintah harus handal dalam mengidentifikasi sektor-sektor apa saja yang potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, sehingga potensi PAD yang diterima akan maksimal.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
periode 2015-2017 (dalam Milyar Rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
		2015	2016	2017
1	Kota Kupang	145.154.792.156	165.449.023.460	201.909.910.887
2	Kabupaten Kupang	67.270.792.446	73.214.731.552	47.068.405.244
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	76.086.059.848	71.848.806.283	62.868.314.688
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	36.136.381.127	47.974.079.043	78.447.073.563
5	Kabupaten Belu	72.408.429.831	74.823.080.564	75.771.272.635
6	Kabupaten Alor	39.889.986.785	45.718.605.434	57.781.104.292
7	Kabupaten Lembata	28.892.662.673	35.723.669.619	37.926.892.000
8	Kabupaten Flores Timur	47.561.063.030	50.183.797.325	35.798.449.379
9	Kabupaten Sikka	78.096.258.303	80.269.749.570	71.250.272.488
10	Kabupaten Ende	59.449.629.992	68.865.679.022	26.803.342.750
11	Kabupaten Nagekeo	28.618.512.239	29.671.653.790	31.201.916.896
12	Kabupaten Ngada	42.585.723.246	47.502.339.405	53.269.848.102
13	Kabupaten Manggarai Timur	41.465.748.921	44.112.085.695	26.247.555.618
14	Kabupaten Manggarai	75.149.043.636	78.284.065.871	84.334.945.444
15	Kabupaten Manggarai Barat	64.742.881.466	91.068.685.754	88.003.957.660
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	44.191.272.752	43.510.608.957	99.776.097.079
17	Kabupaten Sumba Barat	47.398.743.299	60.967.608.811	65.701.505.769
18	Kabupaten Sumba Tengah	22.023.682.161	21.142.086.430	19.543.071.956
19	Kabupaten Sumba Timur	66.290.916.752	68.222.357.517	73.643.484.628
20	Kabupaten Sabu Raijua	30.262.370.498	31.439.614.081	33.129.217.147
21	Kabupaten Rote Ndao	27.089.991.977	28.842.548.098	25.189.152.457
22	Kabupaten Malaka	25.020.134.187	29.265.208.424	27.170.847.403

(Sumber data: Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur), 2019.

Berdasarkan data diatas, menggambarkan bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2017 perolehan atau realisasi Pendapatan Asli Daerah di 22 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan walaupun ada beberapa kabupaten yang perolehan Pendapatan

Asli Daerahnya menurun dan fluktuatif. Kabupaten/kota yang tingkat Pendapatan Asli Daerahnya meningkat selama tiga tahun yakni, Kota Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Nagekeo. Kemudian kabupaten-kabupaten yang tingkat Pendapatan Asli Daerahnya fluktuatif yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sikka, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Flores Timur. Sedangkan kabupaten yang tingkat Pendapatan Asli Daerahnya menurun dan sekaligus menjadi kabupaten dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah terendah dibandingkan 21 kabupaten/kota lainnya dalam tiga tahun terakhir yaitu Kabupaten Sumba Tengah.

Untuk melihat kemampuan sumber penerimaan daerah, menurut Halim (2007:101) terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi, yakni faktor yang dapat dikendalikan dan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor yang dapat dikendalikan adalah faktor kebijakan dari pemerintah itu sendiri yakni kondisi suatu daerah, peningkatan cakupan penerimaan PAD, menentukan besar kecilnya anggaran, mengadakan pembangunan baru, mencari sumber pendapatan baru, perubahan peraturan dan penyesuaian tarif. Sedangkan faktor yang tidak dapat dikendalikan adalah perkembangan PDRB, jumlah penduduk dan tingkat inflasi.

Ada beberapa kebijakan pemerintah, salah satunya yakni kebijakan dalam mengatur anggaran yang diantaranya yaitu pengeluaran pemerintah atau khususnya belanja modal. Belanja modal merupakan salah satu bentuk dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal ini sangat perlu dilakukan di negara berkembang untuk membangun sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan naiknya perekonomian maka PDRB akan meningkat dan secara otomatis akan menaikkan pula pendapatan masyarakat. Belanja modal yang dikontrol dengan baik akan mendatangkan penerimaan berupa pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi dijadikan sebagai sumber pemasukan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya pajak dan retribusi sangat penting untuk menyokong pembangunan daerah. Gambaran kondisi belanja modal Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode
Tahun 2015-2017 (dalam Milyar Rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	BELANJA MODAL		
		2015	2016	2017
1	Kota Kupang	151.327.467.097	237.590.514.500	292.974.267.161
2	Kabupaten Kupang	152.441.310.330	409.656.705.681	207.637.420.886
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	159.844.079.926	205.413.657.423	162.479.617.487
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	156.625.527.928	181.742.354.822	152.349.223.038
5	Kabupaten Belu	155.489.233.185	192.110.935.584	243.157.597.698
6	Kabupaten Alor	182.061.522.540	214.339.741.312	249.816.273.281
7	Kabupaten Lembata	110.109.377.858	142.948.960.879	113.059.810.243
8	Kabupaten Flores Timur	116.876.776.935	173.657.188.305	122.985.018.142
9	Kabupaten Sikka	109.886.664.636	190.288.369.939	175.439.991.723
10	Kabupaten Ende	154.060.375.540	234.608.150.068	221.774.599.279
11	Kabupaten Nagekeo	184.112.592.114	241.355.067.525	186.773.135.634
12	Kabupaten Ngada	154.426.323.486	220.617.255.160	277.111.996.921

13	Kabupaten Manggarai Timur	184.827.005.073	201.066.979.654	180.331.851.645
14	Kabupaten Manggarai	300.130.363.623	290.465.286.278	220.056.306.128
15	Kabupaten Manggarai Barat	196.133.991.919	249.657.382.291	264.261.481.228
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	203.166.140.923	169.189.960.496	228.084.949.472
17	Kabupaten Sumba Barat	158.971.683.460	253.159.760.865	180.992.265.341
18	Kabupaten Sumba Tengah	165.202.636.724	163.728.564.934	141.880.296.229
19	Kabupaten Sumba Timur	233.615.810.630	274.400.915.200	288.707.184.916
20	Kabupaten Sabu Raijua	269.849.473.740	229.365.456.029	90.443.833.868
21	Kabupaten Rote Ndao	169.434.378.430	211.204.325.818	180.210.509.245
22	Kabupaten Malaka	103.443.958.381	184.675.095.949	220.612.243.411

(Sumber data: *Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*), 2019.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa hampir semua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuatif atau naik turun pada tingkat belanja modalnya, kabupaten-kabupaten tersebut yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Rote Ndao. Kemudian kabupaten/kota dengan tingkat belanja modal yang selalu meningkat yakni Kota Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Ngada. Sedangkan terdapat tiga kabupaten yang realisasi belanja modalnya mengalami penurunan selama tiga tahun yakni Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Halim diatas, bahwa untuk melihat kemampuan sumber penerimaan daerah terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi, yakni faktor yang dapat dikendalikan dan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor yang tidak dapat dikendalikan salah satunya yakni perkembangan PDRB.

Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki ketersediaan potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi tersebut seperti pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan dan perikanan dimana jika terdapat suatu inovasi yang lebih baik akan mengarahkan pada pengoptimalan dan kemandirian dalam mengelola keuangan daerahnya. Hasil dari pemanfaatan potensi tersebut dengan baik akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah yang ditandai dengan adanya penambahan pendapatan masyarakatnya. Dimana dilihat dari kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan.

Kondisi pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di masing-masing kabupaten/kota dapat diketahui dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menurut Tarigan (2010:18) yaitu jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan dari seluruh aktivitas sektor-sektor ekonomi yang terdapat di wilayah itu sendiri. PDRB sangat berkaitan dengan PAD, dimana PDRB merupakan penerimaan pendapatan pemerintah yang dihasilkan dari jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sehingga dengan adanya peningkatan PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa PDRB merupakan fungsi dari PAD yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan berimbas pada peningkatan produktivitas. Mengingat PDRB merupakan fungsi dari PAD, adanya peningkatan PDRB merupakan kesempatan emas bagi

pemerintah daerah untuk menaikkan penerimaan PAD. Gambaran kondisi riil Produk Domestik Regional Bruto dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota Provinsi NTT Periode 2015-2017 (dalam Juta Rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	PDRB		
		2015	2016	2017
1	Kota Kupang	16.688.432	18.864.076	20.936.752
2	Kabupaten Kupang	5.458.399	6.020.701	6.581.312
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	5.556.517	6.173.789	6.822.196
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	2.980.587	3.294.992	3.624.395
5	Kabupaten Belu	3.086.498	3.463.445	3.857.509
6	Kabupaten Alor	2.193.226	2.411.778	2.598.001
7	Kabupaten Lembata	1.332.113	1.465.790	1.589.011
8	Kabupaten Flores Timur	3.813.036	4.200.782	4.631.048
9	Kabupaten Sikka	3.608.056	3.965.143	4.319.903
10	Kabupaten Ende	4.480.467	4.908.032	5.301.253
11	Kabupaten Nagekeo	1.624.933	1.773.149	1.957.666
12	Kabupaten Ngada	2.531.805	2.815.059	3.067.178
13	Kabupaten Manggarai Timur	2.255.863	2.498.760	2.761.215
14	Kabupaten Manggarai	3.296.574	3.642.454	3.998.570
15	Kabupaten Manggarai Barat	2.417.723	2.651.071	2.894.634
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	2.690.033	2.967.576	3.266.528
17	Kabupaten Sumba Barat	1.641.001	1.827.791	1.997.323
18	Kabupaten Sumba Tengah	828.921	917.156	1.001.784
19	Kabupaten Sumba Timur	4.505.564	4.974.413	5.430.310
20	Kabupaten Sabu Raijua	968.545	1.087.658	1.220.665
21	Kabupaten Rote Ndao	2.161.713	2.457.555	2.742.724
22	Kabupaten Malaka	1.971.477	2.177.604	2.392.838

(Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur), 2019.

Berdasarkan data PDRB di atas, dapat dilihat bahwa tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) semua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan selama tiga tahun.

PDRB juga tidak akan terlepas dengan adanya penduduk, dimana penduduk merupakan penggerak utama dari PDRB. Para ahli di ekonomi klasik yang dipelopori Adam Smith beranggapan bahwa jumlah penduduk merupakan komponen input berpotensi yang dapat dijadikan sebagai faktor produksi dalam meningkatkan hasil output produksi suatu rumah tangga dan

perusahaan. Jadi semakin banyak penduduk maka akan semakin banyak tenaga kerja yang dapat digunakan.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Periode Tahun 2015-2017

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK		
		2015	2016	2017
1	Kota Kupang	390.026	402.286	412.708
2	Kabupaten Kupang	347.146	360.228	372.777
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	459.101	461.681	462.980
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	244.498	247.216	249.711
5	Kabupaten Belu	206.476	210.307	213.596
6	Kabupaten Alor	199.787	201.515	202.890
7	Kabupaten Lembata	131.995	134.573	137.714
8	Kabupaten Flores Timur	246.742	248.889	251.611
9	Kabupaten Sikka	313.265	315.477	317.292
10	Kabupaten Ende	269.561	270.886	272.084
11	Kabupaten Nagekeo	139.343	141.310	142.804
12	Kabupaten Ngada	154.526	156.101	159.081
13	Kabupaten Manggarai Timur	272.151	276.620	155.576
14	Kabupaten Manggarai	319.157	324.014	329.198
15	Kabupaten Manggarai Barat	251.229	257.582	263.207
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	318.627	325.699	331.894
17	Kabupaten Sumba Barat	121.743	123.913	125.776
18	Kabupaten Sumba Tengah	68.297	69.606	70.719
19	Kabupaten Sumba Timur	245.916	249.606	252.704
20	Kabupaten Sabu Raijua	85.716	88.826	91.512
21	Kabupaten Rote Ndao	147.379	153.792	159.614
22	Kabupaten Malaka	180.119	183.387	186.312

(Sumber data: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur), 2019.

Berdasarkan data penduduk diatas, dapat dilihat bahwa hampir semua kabupaten di Provinsi NTT jumlah penduduk setiap tahunnya selalu meningkat. Namun berbeda dengan kabupaten Manggarai Timur yang dimana pada tahun ketiga jumlah penduduknya menurun dari tahun sebelumnya. Menurut Purbayu (2005:15) penambahan jumlah penduduk tidak selalu menjadi masalah dan penghambat. Pertambahan penduduk yang diiringi dengan perubahan teknologi akan menambah skala produksi yang mana

banyak penduduk maka akan semakin banyak penduduk yang bekerja dan akan mendorong naiknya tabungan karena bertambahnya pendapatan. Namun peningkatan jumlah penduduk juga akan mengakibatkan perbedaan penerimaan pendapatan, sehingga pembangunan masing-masing daerah tidak sama. Jumlah penduduk yang semakin banyak dan didukung dengan daerah yang berpotensi maka akan semakin banyak pula penduduk yang akan bekerja dan secara tidak langsung akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat disimpulkan semakin banyak jumlah penduduk, maka pendapatan asli daerahnya semakin meningkat dan diiringi dengan naiknya pembangunan ekonomi daerahnya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015-2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana gambaran Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2015-2017?
2. Apakah Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2015-2017?

3. Apakah Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2015-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan, yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2015-2017.
2. Untuk mengetahui apakah Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun atau tidak.
3. Untuk mengetahui apakah Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi diri peneliti sendiri mengenai pengaruh antara Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait kontribusi Belanja Modal, Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Dapat digunakan sebagai studi komparatif (perbandingan) bagi peneliti lain yang berhubungan dengan masalah ini.